

**ANALISIS KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA ABRAHAM  
ACCORD TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN ISRAEL – PALESTINA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

**MUHAMMAD RESTU SAPUTRA**

**E131 16 304**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA  
SERIKAT PADA *ABRAHAM ACCORD* TERHADAP UPAYA  
PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA

N A M A : MUHAMMAD RESTU SAPUTRA

N I M : E13116304

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 18 Oktober 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D  
NIP. 197312051998021001

Nurjanah Abdullah, S.IP, MA  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA  
SERIKAT PADA *ABRAHAM ACCORD* TERHADAP UPAYA  
PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA

N A M A : MUHAMMAD RESTU SAPUTRA

N I M : E13116304

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 15 Oktober 2021.

TIM EVALUASI

Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR .....

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si .....

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si .....

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA .....

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : MUHAMMAD RESTU SAPUTRA**

**NIM : E131 16 304**

**JUDUL : ANALISIS KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT  
PADA ABRAHAM ACCORD TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN  
ISRAEL – PALESTINA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Oktober 2021



Yang Menyatakan

**MUHAMMAD RESTU SAPUTRA**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Segala syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula *shalawat* penulis haturkan kepada Nabi dan Rasul pembawa penerangan bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW sehingga penulis bisa hidup hingga saat ini. Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan sehingga penulis berharap dan menerima dengan terbuka segala jenis saran dan perbaikan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan doa, motivasi, bantuan, dan dukungan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberi cinta dan kasih sayang tak terbatas kepada penulis yaitu, Ayah penulis **Samsuddin, SE** dan Ibu penulis **Dra. Hj. Rusmini**. Terima kasih sepanjang masa dari penulis atas segala bentuk cinta kasih, doa, serta dukungan yang telah dan akan selalu diberikan kepada penulis. Serta kepada adik penulis tercinta, **Maharani Ananda Saputri**, terima kasih juga telah lahir ke dunia melengkapi kebahagiaan keluarga, sehat selalu buat adikku, cinta kasih akan selalu mengalir untukmu sampai kapan pun. Terima kasih atas dukungannya.
2. Seluruh keluarga besar penulis, om tante, sepupu, keponakan, terima kasih atas semua dukungan dan doanya, terkhusus **Tante Tercinta Almh. Hj. Indo Tassi**, terima kasih

atas segala perhatian, doa, dan dukungan untuk penulis yang membuat penulis menjadi lebih kuat hingga saat ini.

3. Rektor Universitas Hasanuddin, **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**, beserta jajarannya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin **Bapak Prof. Dr. Armin., M.Si.**, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak H. Darwis, MA., Ph.D**, terima kasih atas segala ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
6. **Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D**, selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing I, dan **Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.**, selaku dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala saran dan masukan selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat.
7. Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, terima kasih atas segala ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
8. **Bapak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, **Bapak Drs. H. Husein Abdullah, M.Si.**, **Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, dan **Bapak H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR.**, selaku dosen penguji seminar proposal dan ujian skripsi penulis. Terima kasih atas segala masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini serta terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
9. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA.**, **Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D**, **Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA.**, **Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, **Bapak Agussalim Burhanuddin,**

- S.IP., MIRAP., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., dan Bapak Bama Andika Putra, S.IP., MIR.,** terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Kak Rahma, Kak Dayat, Kak Tia, Kak Fatma, Pak Ridho, dan Kak Ita.** Terima kasih atas segala bantuan untuk penulis selama ini dalam menyelesaikan urusan administrasi dari masa perkuliahan hingga pengurusan berkas skripsi.
  11. **Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Nusa Tenggara Timur.** Terima Kasih telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan proses magang selama sebulan, terkhusus kepada **Pak Wahyuni, Pak Fajar, Ibu Resda, Pak Marsel, Pak Arter, Ibu Maria, Ibu Dewi, Kak Nensi,** beserta seluruh karyawan yang telah menerima dengan senang hati dan terbuka kepada penulis.
  12. **Mace Halifah** beserta jajarannya terima kasih atas dukungan dan kebaikan hati yang selalu diberikan kepada penulis, semoga menjadi berkah.
  13. Rekan seperjuangan sejak masa perkuliahan sekaligus rekan tinggal pada awal karir sebagai mahasiswa, **Rizky Hikmatullah,** Pak Aji yang selalu ada setiap waktu. **Fadli Anggara,** sosok cerdas dan brilian. **Agung Abdillah,** rekan yang pantang menyerah. **Mahathir Esa,** *easy going and chill.* **Aria Mahmuda,** rekan baik hati dan tidak sombong. **Adit BM,** selalu menghibur. Terima kasih atas segala dukungan hingga saat ini semoga menjadi berkah dan selalu diberi kesehatan dimana pun kalian berada.
  14. Teman-teman **GENEVA 2016.** **Askel, Fiqram, Ramon, Tatu, Azslam, Syafrie, Erwin, Ardi, Dimas, Kemal, Farhan, Fahmi, Faturrahman Alex, Rivai, Arafah, Moty, Icha, Maya, Ika, Era, Medi, Lia, Inma, Evin, Septi, Ikрана, Ifa, Riri, Titan,**

**Tita, Nabila, Nyunyu, Dea, Tami, Sulas, Chantika, Ainil, Rezti, Jemima, Uci, Ilmi, Silvi, Mule, Yuspus,** syukur penulis bisa menjadi bagian dari keluarga besar angkatan ini, semoga kalian sukses dengan karir masing-masing. Semoga kekeluargaan ini tetap terjaga. Ucapan khusus buat teman kita yang telah pergi lebih dahulu, **Saudari Tika Kusuma Hasmita**, terima kasih telah menjadi teman yang baik, semoga tenang di sisinya. Al-Fatihah.

15. **HIMAHI FISIP UNHAS.** Terima kasih kepada organisasi beserta orang-orang di dalamnya telah membuat penulis mempelajari banyak hal.
16. **Teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2016.** Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan dimana pun berada.
17. **KKN UNHAS GELOMBANG 102.** Terkhusus bagi teman-teman seperjuangan **Posko Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Eky, Aca, Dilla, Guntur, Awal, Mifta, dan Ana.** Terima kasih atas kebersamaan selama sebulan di lokasi pengabdian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
18. **D'B3 Voice FISIP UNHAS.** Syukur penulis bisa bergabung dengan keluarga ini, dikelilingi orang-orang baik dan keren. Terima kasih buat semua orang-orang di dalamnya. Maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena terlalu banyak. *Special thanks* buat **Dewan Pengawas Organisasi D'B3 Voice periode 2019-2020, Jane, Jenica, Cici, dan Ainun,** terima kasih telah sama-sama berkontribusi menjalankan tugas sebagai DPO.
19. **Sokola Kaki Langit.** Terima kasih telah memberikan penulis kesempatan bergabung di keluarga ini. Begitu banyak pembelajaran yang bisa dipetik oleh penulis sejak bergabung dalam perkumpulan ini. Semoga bahagia dan terus menginspirasi, kakak-kakak hebat.

20. Kakak-kakak “**pernongkian**” yang selalu menjadi ruang penulis untuk tetap terhibur dan tertawa. **Kak Achie, Kak Manda, Kak Chelsy, Kak Thata, Kak Muttia, Kak Gen, Kak Nunu, Kak Diah, Kak Beatrix, Kak Patrik, Kak Ilham, dan Kak Felix.** Terima kasih telah mendukung penulis dalam meniti karir.
21. Grup ceria lainnya yang membuat penulis merasa senang, “**Haluwers**”, **Kak Icdan, Kak Asrin, Kak Fila, Yurike, Susan, Clara, Sherine, Gadis, Merry, Aan, Yobel, Kenny, dan Reza.** Terima kasih atas berbagai forum pertemuan baik online maupun offline membahas tentang segala hal di muka bumi ini, semoga kebersamaan selalu terjaga.
22. Teman-teman diskusi penulis dalam membahas berbagai hal. **Kak Iriansyah, Kak Willy, Zaman, Nyompa, Yhola, Uga, Ardin, Ardi, Gurka, Nila, Gusna, Bams, Nandito,** dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas proses pertukaran pikiran, semoga akal sehat tetap hidup.
23. **Badminton Smunel Club.** Terima kasih telah menjadi ruang olahraga kesukaan penulis hingga saat ini, semoga kita semua tetap menjaga silaturahmi dan rasa kekeluargaan. *Special credits to Abel, Luthfi, Viqi, Ayu, Teguh, Farhan Badai, Alul, Madan, dan Zul.*
24. Sahabat masa SMA penulis, **Amal Ridha dan Ferdiansyah.** Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, semoga menjadi berkah dan dilimpahkan rezeki serta kesehatan.
25. Sahabat penulis, **Lisa, partner in crime** yang setia menemani penulis berbincang tentang banyak hal, semoga selalu diberkahi rezeki dan kesehatan.

26. Terima kasih juga buat diri sendiri yang telah berproses di segala tempat sehingga menjadi manusia seperti saat ini. *Insy Allah* akan berjuang untuk terus menemukan hal yang baru.

Penulis bersyukur masih dikelilingi orang-orang baik sekaligus memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila penulis pernah melakukan kesalahan. Penulis menyadari bahwa pribadi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga kedepannya penulis bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, dan semoga tulisan ini membawa manfaat bagi orang-orang yang membacanya. *Wabillahi taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 18 Oktober 2021

Penulis

## ABSTRAK

**Muhammad Restu Saputra, E131 16 304 “Analisis Kepentingan Luar Negeri Amerika Serikat pada *Abraham Accord* Terhadap Upaya Perdamaian Israel-Palestina”** di bawah bimbingan **Muh. Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D** selaku Pembimbing I dan **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kepentingan luar negeri Amerika Serikat pada *Abraham Accord* terhadap upaya perdamaian Israel-Palestina. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka (library research). Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan metode deduktif sebagai metode penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan dan peran Amerika Serikat dalam *Abraham Accord* adalah sebagai mediator normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. *Abraham Accord* berdampak positif bagi negara-negara yang terlibat sedangkan bagi Palestina, kebijakan ini menjadi kemunduran bagi pembentukan negara Palestina.

**Kata Kunci: Kepentingan, *Abraham Accord*, Neorealisme Defensif, Israel, Palestina**

## ABSTRACT

**Muhammad Restu Saputra, E131 16 304 “Analysis of American Foreign Interest on Abraham Accord towards Israel-Palestine Peace Efforts”** under the guidance of **Muh. Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D** as Advisor I and **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** as Advisor II, Department of International Relations Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.

This thesis aimed to analyse and elaborate the American foreign interest on Abraham Accord towards Israel-Palestine peace efforts. The research method undergone within this thesis is qualitative type of research. The type and source of data is qualitative type of data and secondary sources of data in which collected through the library research method as data collection technique. The research analysis technique is qualitative data analysis with a deductive approach method.

The result of the researches shows that American interest and role on the Abraham Accord is to mediate the relationship normalization of Israel, United Arab Emirates, and Bahrain. Abraham Accord has a positive impact for the involved countries while for Palestine, this policy is a setback for the establishment of a Palestinian state.

**Keywords: Interest, *Abraham Accord*, Defensive Neorealism, Israel, Palestine**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Teori Neorealisme Defensif.....	16
B. Konsep Kebijakan Luar Negeri .....	24
C. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>30</b>
A. Transformasi Konflik Berkenpanjangan Israel-Palestina.....	30
B. Normalisasi Hubungan Israel dengan Negara Arab dalam <i>Abraham Accord</i> .....	42
<b>BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA ABRAHAM ACCORD TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN ISRAEL – PALESTINA</b> .....	<b>50</b>
A. Kepentingan dan Peran Amerika Serikat dalam <i>Abraham Accord</i> .....	50
B. Dampak Perjanjian <i>Abraham Accord</i> Terhadap Konflik Israel-Palestina.....	71
1. Dampak Positif bagi negara yang terlibat di dalamnya .....	74
2. Dampak Negatif bagi bangsa Palestina .....	77
3. Kondisi Pasca Perjanjian <i>Abraham Accord</i> .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>Gambar 2 Asumsi Dasar Neorealisme .....</b>	<b>21</b>
<b>Gambar 3 Analisis Peran Amerika Serikat dalam <i>Abraham Accord</i> .....</b>	<b>69</b>
<b>Gambar 3 Dampak Perjanjian <i>Abraham Accord</i> Terhadap Konflik Israel-Palestina.....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara sebagai salah satu aktor penting dalam studi ilmu hubungan internasional, berkewajiban untuk menjamin kehidupan warga negaranya. Warga negara perlu kehidupan yang tenteram dalam negaranya. Hal tersebut menjadi kepentingan dasar sebuah negara. Atas dasar tersebut, negara harus berusaha dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Mekanisme pencapaian kepentingan nasional dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin suatu negara. Pemimpin setiap negara memiliki perspektif serta ideologi tersendiri dalam merumuskan kebijakan, namun semua pemimpin negara memiliki kemiripan tujuan yaitu mencapai kesejahteraan nasional. Pemimpin sebuah negara mengambil tindakan untuk pencapaian tujuan dengan berbagai cara baik jalur koersif maupun jalur kooperatif.

Salah satu strategi pemimpin negara adalah dengan merumuskan sebuah kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Kebijakan luar negeri berakar dari kondisi saling memiliki kepentingan antara suatu negara dengan negara lainnya. Hubungan antar negara penting untuk dibentuk demi proses pencapaian kepentingan nasional (*national interest*). Unsur-unsur pembentuk sebuah negara yaitu rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Definisi ini mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara, dalam artian setiap negara akan dibatasi oleh wilayah dan ruang cakupan kedaulatan. Kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh pemimpin negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang tidak dapat terkendalikan atau berada diluar wilayah kekuasaan (Oppenheim, 1912).

Strategi kebijakan luar negeri sendiri memiliki berbagai level sistemik, seperti yang dikatakan oleh Stephen Walt bahwa seringkali struktur internasional akan sedikit memaksa negara-negara lain untuk menyetujui kebijakan tertentu. Negara yang seringkali mengambil langkah ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan tegas ingin mempertahankan hegemoni secara global. Amerika Serikat aktif dalam kegiatan internasional dan seringkali menjadi inisiator dalam menjalin kerja sama. Politik luar negeri Amerika Serikat sangat kuat, Amerika Serikat terus mengembangkan kebijakan luar negeri untuk pencapaian cita-cita mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang (Walt, 1998).

Tujuan-tujuan dan tindakan pengambilan keputusan yang akurat dilakukan oleh pemerintah negara untuk lebih efektif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara luar. Definisi ini adalah inti dari cakupan terkait konsep kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri lahir dari kondisi internal sebuah negara, namun membutuhkan kerja sama lintas negara dalam pencapaiannya. Amerika Serikat salah satunya, negara tersebut memiliki cita-cita jangka panjang ingin menjadi negara hegemoni. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pimpinan negara Amerika Serikat mengarah kepada tujuan tersebut, melalui kebijakan-kebijakan jangka pendek. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat akan selalu terdengar hingga seluruh belahan dunia. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat mengandalkan dua kekuatan dan kapabilitas yang mereka miliki, yaitu militer dan media. Pemerintah Amerika Serikat sangat memaksimalkan peran dari media agar tujuan mereka tercapai.

Amerika Serikat pasca menjadi pemenang Perang Dingin berubah menjadi negara adidaya. Amerika Serikat terus berusaha mencapai tujuan jangka panjang yaitu

hegemoni global. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat berhasil berkembang ke seluruh penjuru dunia, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini masih jauh dari pencapaian hegemoni global sehingga Amerika Serikat terus aktif berpolitik luar negeri. Oleh karena itu, Amerika Serikat aktif menginisiasi berbagai kerja sama dengan negara-negara lain.

Langkah penting yang diambil Amerika Serikat adalah membentuk aliansi dengan berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Sistem aliansi regional menjadi salah satu senjata andalan Amerika Serikat dalam mencapai berbagai tujuan melalui kebijakan luar negeri. Amerika Serikat menjalin afiliasi dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk bidang kemitraan yang berkelanjutan seperti perdagangan, investasi, dan teknologi (Jakarta, 2019). Mekanisme kerja kebijakan luar negeri Amerika Serikat efektif apabila dilihat dari perspektif realisme dimana kekuatan dan kekuasaan negara ini cukup baik dalam menunjang keberhasilan dari sebuah kebijakan. Kekuatan dan kekuasaan internasional Amerika Serikat sangat mempengaruhi kebijakan luar negerinya.

Amerika Serikat saat ini menargetkan perdamaian bagi dunia. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan beberapa tahun ini lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian. Mekanisme kerja sama regional masih menjadi senjata yang digunakan dalam proses mencapai tujuan tersebut. Salah satu target Amerika Serikat saat ini adalah mendamaikan konflik antara Palestina dan Israel. Amerika Serikat sejak lama telah mencoba menjadi mediator dalam konflik ini. Isu Palestina-Israel ini telah bergulir sejak lama hingga saat ini belum menemui titik terang.

Konflik Palestina-Israel dimulai sejak kisaran tahun 1900-an dimana adanya sengketa wilayah antar dua belah pihak. Pasca perang dunia I, Inggris diberi mandat untuk membentuk sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Gelombang migrasi kelompok yahudi terjadi dalam skala besar. Hal tersebut dikarenakan, pada masa itu sedang terjadi gerakan anti-semit di Eropa, sebuah gerakan pengusiran paksa yang menargetkan kelompok yahudi. Konflik semakin membesar ketika tahun 1947 PBB menyetujui usul bahwa wilayah yang disengketakan dibagi menjadi dua bagian, kelompok Yahudi diberi nama Israel dan kelompok Arab diberi nama Palestina (Putri, 2020).

Konflik Palestina-Israel berlangsung panjang hingga saat ini. Usaha diplomatik yang dijalankan tidak membuahkan hasil. Kedua pihak berpendapat bahwa mereka berhak atas wilayah yang lebih luas, namun hingga saat ini tidak ada jalan tengah bagi kedua pihak. Konflik terus berlanjut, adu kekuatan militer terus terjadi dan setiap hari memakan korban jiwa. Usaha perdamaian terus menerus dilakukan dari berbagai jalur melihat banyaknya korban jiwa yang terus bertambah setiap hari. Pasukan militer Israel dan Palestina bergantian untuk saling serang demi melindungi hak atas wilayah mereka masing-masing. Perebutan tanah ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, dimana saling berkaitan dengan isu agama. Wilayah sengketa yang diperebutkan meilbatkan sejarah yang cukup jauh, yaitu terbentuknya tiga agama besar di wilayah tersebut. Adapun agama yang dimaksud adalah Islam, Nasrani, dan Yahudi. Agama-agama ini masing-masing mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah tempat suci bagi agama mereka. Akibatnya, saling klaim antara kelompok Yahudi Eropa dan kelompok Islam Arab terus

berlangsung dan meyakini bahwa tanah mereka adalah tanah suci sehingga mereka berebut hak atas wilayah (Cohen, 1989).

Amerika Serikat sebagai negara dengan cita-cita membentuk perdamaian dunia tidak tinggal diam melihat konflik ini. Amerika Serikat sendiri memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Israel, hal ini membuat Palestina merasa tidak adil ditambah dengan berbagai isu seperti pengesahan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pemindahan kantor kedutaan Amerika Serikat ke Tel Aviv, Israel, hingga penghilangan tanda wilayah Palestina pada peta. Meskipun sampai sebatas isu, Palestina merasa tidak terima dengan tindakan Amerika Serikat ini sehingga sulit bagi Palestina untuk menerima perjanjian damai yang ditawarkan.

Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Donald Trump, berulang kali mengajukan mosi perdamaian bagi dua pihak. Hal ini kemudian bertentangan dengan aktivitas dari Israel. Israel melakukan ekspansi ke tepi barat, dimana secara wilayah tersebut merupakan wilayah Palestina. Palestina terbagi dua kubu antara Fatah dan Hamas, hal ini membuat sulitnya terjadi negosiasi dengan Israel. Aspek terakhir yang mempengaruhi sulitnya negosiasi antara Palestina dan Israel adalah Israel skeptis terhadap keseriusan pemerintah Palestina untuk berdamai, begitupun sebaliknya (Beauchamp, 2018).

Amerika Serikat saat ini masih berusaha menciptakan perdamaian bagi Palestina dan Israel. Strategi kebijakan luar negeri Donald Trump kali ini sedikit berbeda, Amerika Serikat memosisikan diri bukan lagi sebagai moderator, namun kali ini melibatkan beberapa negara-negara lain untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun ini. Amerika

Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump kali ini melibatkan negara-negara lain untuk membentuk satu perjanjian damai. Perjanjian ini selanjutnya dinamakan *Abraham Accord*. Negara-negara inisiator perjanjian ini adalah Amerika Serikat, Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan perdamaian. Hal tersebut akan mempengaruhi proses perdamaian konflik antara Palestina dan Israel, namun perjanjian ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi Palestina.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara terlibat dalam kesepakatan *Abraham Accord*. Bentuk kebijakan luar negeri Donald Trump berupa tawaran kesepakatan perdamaian antara empat negara yaitu Amerika Serikat, Israel, Bahrain, dan Uni Emirat Arab serta dampak kesepakatan *Abraham Accord* terhadap isu Israel-Palestina. Kerja sama empat negara ini diberi nama *Abraham Accord* dan ditandatangani oleh empat negara terlibat pada 15 September 2020. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan penjelasan pada latar belakang yaitu :

1. Bagaimana peran Amerika Serikat dalam perjanjian *Abraham Accord*?
2. Bagaimana dampak kesepakatan *Abraham Accord* terhadap isu Palestina-Israel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Amerika Serikat dalam perjanjian *Abraham Accord*.
2. Untuk mengetahui dampak kesepakatan *Abraham Accord* terhadap isu Palestina-Israel.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat pemerintahan Donald Trump dan dampak kesepakatan *Abraham Accord* terhadap isu Palestina-Israel.
2. Bagi Akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan kesepakatan *Abraham Accord* terhadap isu Palestina-Israel.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan Teori Neorealisme Defensif dan Konsep Kebijakan Luar Negeri.

##### **1. Teori Neorealisme Defensif**

Istilah neorealisme mulai dikenal dalam studi ilmu hubungan internasional sejak akhir tahun 1970-an. Neorealisme sendiri berkembang dari akar paradigma realisme klasik. Salah satu tokoh pemikir neorealisme yang terkenal adalah Kenneth Waltz. Kenneth Waltz dalam buku tulisan Jackson dan Sorensen memandang bahwa “hubungan antarnegara adalah sebuah presentasi dari struktur anarki internasional yang tersebar diantara negara-negara” (Jackson & Sorensen, 2013). Teori ini meyakini bahwa efektivitas kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh seberapa besar kapabilitas dari unit sistemnya. Unit sistem menunjang ketercapaian cita-cita sebuah bangsa. Sebagai contoh, Amerika Serikat merupakan negara yang bertujuan menjadi hegemoni dunia didukung dengan kekuatan militer dan medianya. Setelah memiliki

kekuatan bidang militer dan media, Amerika Serikat merumuskan kebijakan-kebijakan kecil dalam pencapaian tujuan jangka panjangnya.

Teori ini memandang bahwa pemimpin negara sulit membuat arah kebijakan luar negeri yang rinci untuk mempengaruhi aktor lain apabila tidak disertai kekuatan dan kekuasaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya struktur internasional yang membatasi ruang gerak sebuah negara (Waltz, 1979, pp. 195-210). Teori ini berkembang pesat pasca perang dingin ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat bersitegang dan menimbulkan dua blok besar pada waktu itu. Waltz meyakini keberadaan dua blok besar ini memberi jaminan keamanan dan perdamaian yang lebih stabil dibanding lebih dari dua blok aliansi. Kondisi lebih dari dua blok besar sulit tercipta stabilitas internasional, karena tidak berimbangnya kekuatan dan peluang saling menjatuhkan lebih tinggi.

Waltz juga berpendapat bahwa sistem internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dibentuk oleh negara-negara *superpower*. Hal ini disebabkan oleh kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut sulit ditandingi sehingga negara maupun aktor lain akan lebih sulit untuk mempengaruhi negara *superpower* tersebut melalui kebijakan luar negeri. Sebaliknya, lebih mudah bagi negara *superpower* untuk mempengaruhi aktor lain sebagai bentuk pencapaian cita-citanya melalui kebijakan luar negeri (Waltz, 1979).

Pandangan neorealisme sendiri terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu neorealisme ofensif dan neorealisme defensif. Kedua pandangan ini memiliki perbedaan yang cukup besar. Neorealisme ofensif pertama kali dikenalkan oleh John Mearsheimer. Teori ini memandang bahwa negara hegemoni sebagai pembentuk sistem internasional adalah negara-negara besar yang ingin memaksimalkan kekuasaannya untuk

mendominasi kebijakan dan mempengaruhi aktor lain dengan kebijakan luar negerinya. Neorealisme ofensif menyatakan bahwa negara besar tidak ingin menciptakan perdamaian secara global melainkan berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara yang agresif dan mendominasi aktor lain melalui struktur internasional yang mereka bentuk (Mearsheimer, 2001, p. 29).

Neorealisme defensif berkebalikan dengan neorealisme ofensif. Pemikir neorealisme defensif terkemuka adalah Kenneth Waltz. Neorealisme defensif tidak menolak adanya konflik internasional namun teori ini memandang bahwa struktur internasional yang dibentuk oleh negara-negara besar, berkewajiban untuk menjadi inisiator dalam tujuan dasar sebuah negara yaitu menjamin keamanan dan perdamaian nasional dalam skala yang lebih besar (Waltz, 1979). Teori ini percaya bahwa struktur internasional memiliki tujuan meminimalisir konflik dengan cara non-kekerasan.

Kenneth Waltz membagi tiga tingkat penyebab konflik:

- 1) Individu, konflik yang timbul dari individu biasanya dipicu oleh perilaku kepala negara atau pemimpin politik,
- 2) Negara, konflik yang timbul dari negara biasanya dipicu oleh kondisi internal setiap negara seperti ideologi negara yang bersinggungan dengan ideologi negara lain sehingga tiap negara merasa terancam dengan gangguan ideologi dari negara lain,
- 3) Sistem Internasional, tingkat tertinggi yang diyakini sebagai penyebab konflik. Bagian ini mempercayai bahwa penyebab konflik adalah sesuatu yang bersifat sistematis. Sistem internasional yang anarkis contohnya, tidak

adanya lembaga yang berwenang untuk mengatur interaksi negara-negara (Waltz, 1979).

## 2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) secara umum didefinisikan sebagai konsep regulasi yang dirumuskan pemerintah suatu negara untuk mencapai hal-hal diluar batas wilayahnya. Regulasi dicetuskan oleh negara untuk mencapai cita-cita atau kepentingan eksternal wilayahnya yang nantinya akan mempengaruhi kondisi internal negara tersebut. Kebijakan luar negeri dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah yang memimpin. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik antarnegara. Hubungan yang baik terjadi apabila dua pihak atau lebih memiliki tujuan yang sama dan bentuk kebijakan luar negeri yang tidak saling tumpang tindih.

Begitu banyak bentuk kerja sama yang telah dihasilkan oleh kebijakan luar negeri. Kerja sama sendiri memiliki berbagai bentuk antara lain: kerja sama regional, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya, kerja sama investasi, dan lain lain. Kerja sama merupakan salah satu tujuan kebijakan luar negeri. Pemerintah negara sebagai perumus kebijakan perlu memengaruhi aktivitas aktor lain yang tidak berada di wilayah kedaulatannya untuk mencapai cita-citanya (Calsnaes, 2002).

Menurut William D. Coplin, terdapat tiga jenis tipikal kebijakan luar negeri antara lain:

- 1) Kebijakan luar negeri yang bersifat umum. Kebijakan ini biasanya dirumuskan langsung oleh kepala negara.

- 2) Kebijakan luar negeri yang bersifat administratif. Kebijakan ini biasanya dirumuskan oleh birokrasi pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas hubungan luar negeri.
- 3) Kebijakan luar negeri yang bersifat krisis. Kebijakan ini merupakan kombinasi dari dua tipe sebelumnya. Tipe ini dilaksanakan untuk menyelesaikan isu yang bersifat genting (Coplin, 1971).

Masih menurut William D. Coplin, dalam kebijakan luar negeri penting menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah. Dalam perumusan kebijakan terdapat beberapa langkah yang diperlukan. Langkah tersebut dikenal dengan istilah tahapan ideal dalam menentukan kebijakan yang efektif. Langkah-langkah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Situasinya (*Define of the Situation*)

Pada tahap awal proses pembuatan keputusan, seorang pemimpin harus memiliki informasi yang cukup tentang isu yang sedang bergulir. Kepala pemerintahan memiliki banyak metode dalam mendapatkan informasi, melalui keaktifan di forum-forum internasional, melalui kementerian yang fokus pada hubungan luar, dan hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara aliansi. Jadi, pemerintah harus menggali informasi sebanyak-banyaknya.

- 2) Memilih Tujuan (*Select Goals*)

Setelah mendapatkan informasi, pemerintah melakukan pengolahan data yang baik demi mendapatkan rumusan kebijakan yang efektif. Informasi yang dikumpulkan pada awalnya akan sangat meluas namun setelah melalui proses pendalaman masalah,

informasi yang didapatkan akan menyempit. Setelah itu perumus kebijakan akan mendapatkan hasil yang maksimal.

### 3) Pencarian Alternatif-alternatif (*Search for Alternatives*)

Dalam beberapa hal, pemerintah perlu memikirkan tujuan kebijakan lebih jauh. Hal ini dapat bermuara kepada hubungan diplomatik yang erat atau hanya untuk pencapaian kepentingan nasional semata. Proses pencarian alternatif ini diperlukan untuk menelaah metode-metode dalam perumusan kebijakan untuk pencapaian tujuan.

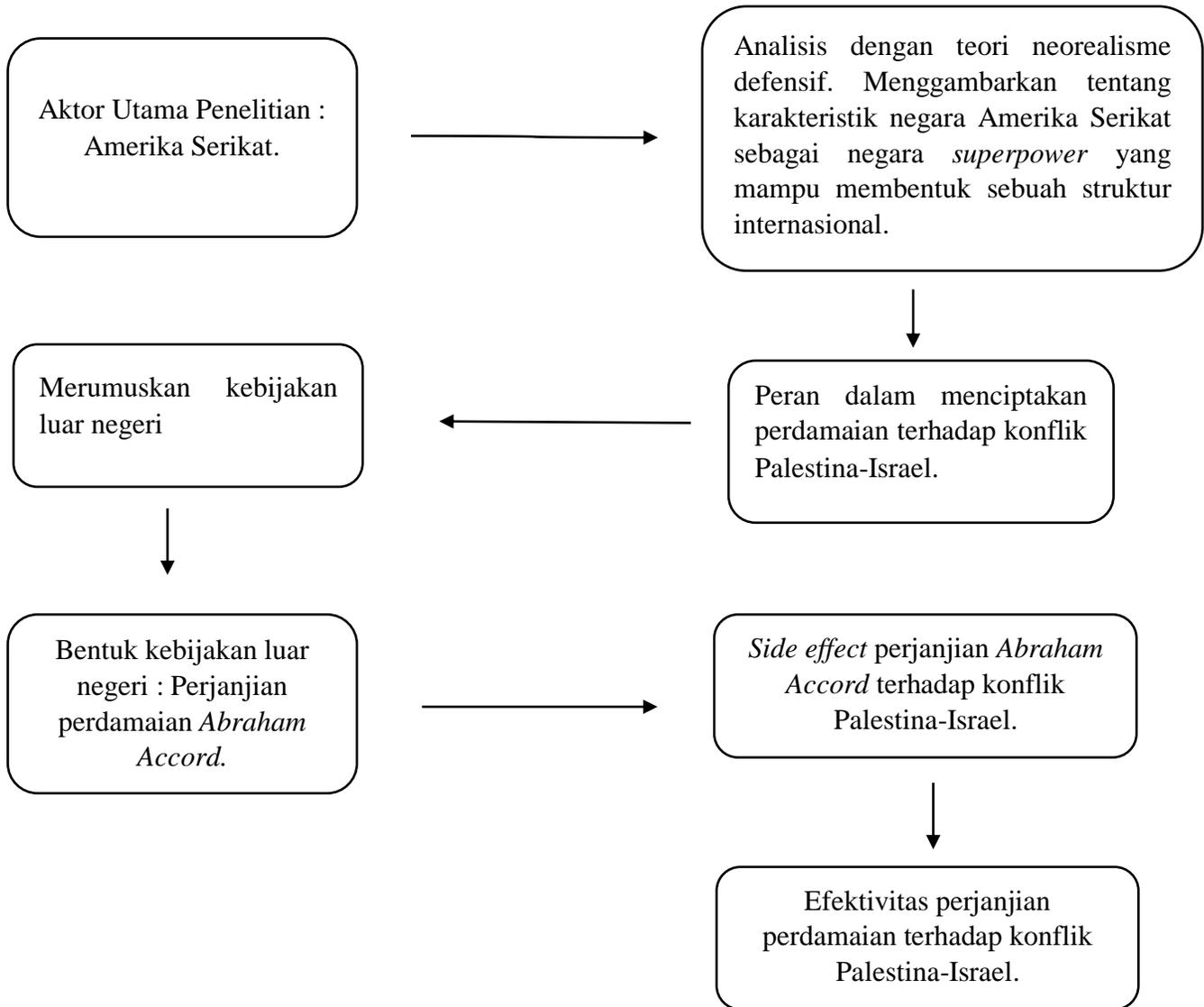
### 4) Memilih Alternatif (*Choosing for Alternative*)

Langkah ini merupakan langkah akhir daripada tahap perumusan kebijakan luar negeri. Alternatif yang diambil telah melalui analisis secara rinci. Hasil akhir kebijakan yang dirumuskan akan menunjang pencapaian kepentingan nasional. Jika keempat langkah ini dilakukan, kebijakan yang lahir akan menjadi cikal bakal hubungan diplomatik (Coplin, 1971).

Salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang efektif adalah kesepakatan antar negara. Kesepakatan mengurangi potensi konflik yang bersifat kekerasan, dalam hal ini militer. Bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara akan menghasilkan poros kerja sama yang lebih baik antar pihak. Dengan demikian, proses mencapai kepentingan nasional masing-masing akan lebih mudah.

Penulis akan menganalisis salah satu kebijakan luar negeri yang berbentuk perjanjian perdamaian dan peran salah satu aktor penting dalam perjanjian itu, Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu aktor penting dalam terciptanya perjanjian *Abraham Accord*. Amerika Serikat memandang ini sebagai salah satu cara penyelesaian konflik berkepanjangan antara Palestina dengan Israel.

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Penelitian

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Penulis memilih metode kualitatif untuk mendeskripsikan secara rinci kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump lebih khusus terkait sikap Amerika Serikat

memandang isu Palestina-Israel. Terbentuknya perjanjian *Abraham Accord* menjadi titik fokus analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Metode ini digunakan untuk relevansi penelitian, dimana penulis ingin menggambarkan dan menganalisis keseluruhan data yang dikumpulkan. Metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara rinci terhadap suatu objek atau produk tertentu dan menganalisisnya dengan sebuah kasus.

Serta dalam metode ini juga, penulis mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan *update* data terkait kasus yang penulis teliti. Dengan kata lain, dalam metode ini mengharuskan mengumpulkan data dari berbagai sumber.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung. Sumber data sekunder berupa sumber dari buku, majalah ilmiah, maupun dokumen-dokumen terkait. Data sekunder ini juga dibutuhkan penulis untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Adapun data yang dibutuhkan yaitu, data yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump terhadap isu Palestina-Israel dan data *update* terkait studi kasus yang penulis teliti, yaitu *Abraham Accord*.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

## **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikelola dan dikaitkan dengan teori dan konsep yang penulis gunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan

## **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan data dan analisa secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Neorealisme Defensif**

Teori Neorealisme defensif pertama dikemukakan oleh Kenneth N. Waltz dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* (1979). Dalam buku tersebut, Waltz berasumsi bahwa tatanan negara-negara merdeka hidup dengan baik dengan sistem anarki internasional. Anarki diartikan sebagai kondisi setiap negara merupakan unit yang serupa dan mampu membentuk perimbangan kekuatan. Namun, di satu sisi teori ini beranggapan bahwa adanya level sistemik berupa struktur dalam hubungan internasional mampu menjaga kedamaian dunia. Negara-negara berkekuatan besar sewajarnya menciptakan rasa aman bagi negara-negara kelas rendah. Negara yang dianggap kelas rendah mencakup beberapa faktor antara lain: keamanan, stabilitas politik dan ideologi, ekonomi, hingga kesejahteraan sosial (Waltz, 1979).

Teori ini menekankan pada struktur internasional penting sebagai inisiator perdamaian dunia. Status struktur internasional merujuk pada fakta negara-negara besar mampu memberikan pengaruh terhadap negara-negara kecil. Negara yang memiliki *power* lebih kuat mampu memiliki kuasa atas tatanan dunia. Teori ini berkuat pada pendekatan level sistemik. Asumsi ini terkait dengan pemikiran Waltz bahwa dunia dengan jumlah negara berkekuatan besar lebih sedikit cukup efektif mencegah konflik. Waltz mengembangkan pemikiran ini pasca Perang Dingin, dimana dia melihat fenomena perimbangan kekuatan mampu menjamin keamanan meskipun kedua pihak terlibat tetap bersitegang, dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Soviet (Waltz, 1979, pp. 195-210).

Kepentingan nasional dapat dicapai dengan membentuk institusi internasional dalam hal ini kerja sama antarnegara (Waltz, 1979, pp. 97-99). Waltz berpendapat bahwa konflik kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. Konflik hanya merugikan pihak terlibat, oleh karena itu, Waltz dengan gagasan teori neorealisme memandang bahwa pendekatan secara sistemik lebih memungkinkan terciptanya struktur pencegahan konfrontasi yang lebih efisien. Waltz melihat berdasarkan fenomena perang dingin yang terjadi pada tahun 1960-an. Dua kubu memiliki ideologi berbeda dan membentuk kekuatan dunia yang tidak dapat tertandingi pada masa itu. Amerika Serikat dengan Kapitalisme dan sistem kesejahteraan ekonomi masyarakatnya memiliki perbedaan pandangan dengan Uni Soviet dengan Komunisme dan sistem masyarakat tanpa kelasnya. Perbedaan tersebut memicu ketegangan antarpihak lalu dibarengi dengan pembangunan senjata tanpa henti. Mekanisme tersebut menciptakan sistem *bipolar* di dunia. Waltz menganggap sistem *bipolar* jauh lebih efisien dalam menjamin keamanan dan perdamaian dibanding sistem *multipolar* atau desentralisasi kekuatan yang terjadi pada sebelum dan sesudah perang dingin.

Teori neorealisme sendiri muncul setelah teori-teori realisme klasik tidak mampu menjawab alasan meletusnya Perang Dingin. Teori neorealisme memiliki istilah lain yaitu teori realisme struktural. Struktural artinya berdasar pada susunan atau hierarki global. Mearsheimer, salah satu pemikir teori neorealisme, memberikan perbedaan antara teori realisme klasik dan teori neorealisme. Mearsheimer menilai bahwa teori realisme klasik menganggap bahwa negara sangat menginginkan kekuasaan serta kekuatan karena sifat dasar manusia sedangkan menurut teori neorealisme, sistem atau

tatanan global yang memaksa negara-negara membentuk kekuatan nasionalnya (Mearsheimer, 2001).

Fenomena hubungan internasional sangat multidisiplin serta banyak variabel yang mempengaruhi analisis. Salah satu faktor penting dalam analisis fenomena adalah negara. Teori neorealisme juga mengakui negara sebagai aktor utama. Negara dianggap perlu menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mempertahankan eksistensi, mencapai kepentingan nasional, hingga hegemoni global. Hierarki yang diciptakan melalui hegemoni mampu menjamin keamanan dunia lebih stabil, hal ini disebabkan negara lebih kuat mampu melindungi aliansinya dengan kekuatan yang dimiliki. Dinamika militer global bertransformasi menjadi *balance of power* sehingga menciptakan keseimbangan kekuatan antar negara.

Analisis Waltz pada mekanisme akumulasi kekuasaan secara struktural menyimpulkan bahwa sebuah negara tidak akan mampu menangani konflik internasional secara mandiri (Waltz, 1979). Mereka harus melakukan kerja sama membangun aliansi dalam membentuk kekuatan. Kritik Waltz terhadap realisme yang gagal menangani penyebab konflik adalah karena gagalnya pemahaman terhadap struktur sebagai kekuatan yang dapat mendorong unit. Waltz percaya sistem internasional yang stabil memiliki tiga prinsip mendasar. Prinsip mendasar tersebut yaitu:

1. Prinsip tatanan sistem
2. Karakter unit dalam sistem
3. Distribusi kemampuan unit dalam sistem

Pertama, prinsip tatanan sistem yang dimaksud adalah sistem hierarkis dengan dasar kekuasaan dan otoritas politik yang melalui proses yurisdiksi berdasarkan politik dan hukum internasional. Tatanan yang diinginkan Waltz adalah anarkis dimana tidak terdapat otoritas penuh yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Negara dalam kondisi harus mendapatkan kekuatan militer untuk berlangsung hidup. Waltz meyakini sifat anarkis dalam sistem internasional akan mampu mengikuti perkembangan peradaban hingga menciptakan stabilitas perdamaian dunia.

Kedua, karakter unit dalam sistem. Semua negara dalam sistem anarkis harus dibuat seimbang secara fungsional dengan tekanan struktur anarkisme. Tatanan anarkisme memaksa suatu disiplin pada negara untuk mendahulukan keamanan nasional sebelum kebutuhan diplomatik lainnya. Hal ini mempengaruhi faktor ketiga yaitu distribusi kemampuan unit dalam sistem.

Ketiga, distribusi kemampuan unit dalam sistem mengharuskan tiap unit dalam hal ini negara-negara mampu mengembangkan fungsi unitnya secara maksimal. Setiap negara mempunyai tujuan yang sama yaitu keamanan nasional namun jalur yang dilalui berbeda-beda berdasarkan kekuatan relatif negara tersebut (Waltz, 1979).

Penyelesaian konflik menurut pemikir teori neorealisme dapat dilalui melalui jalur non kekerasan, baik secara resolusi konflik maupun pencegahan konflik. Resolusi konflik memungkinkan penurunan intensitas konflik melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Konflik berkepanjangan dapat direduksi melalui adanya komunikasi antar negara terlibat baik secara langsung maupun melalui perantara. Konflik dapat terselesaikan apabila negara-negara yang kuat menggunakan kekuatan secara efektif. Metode yang perlu dilakukan untuk menormalisasi hubungan negara berkonflik adalah

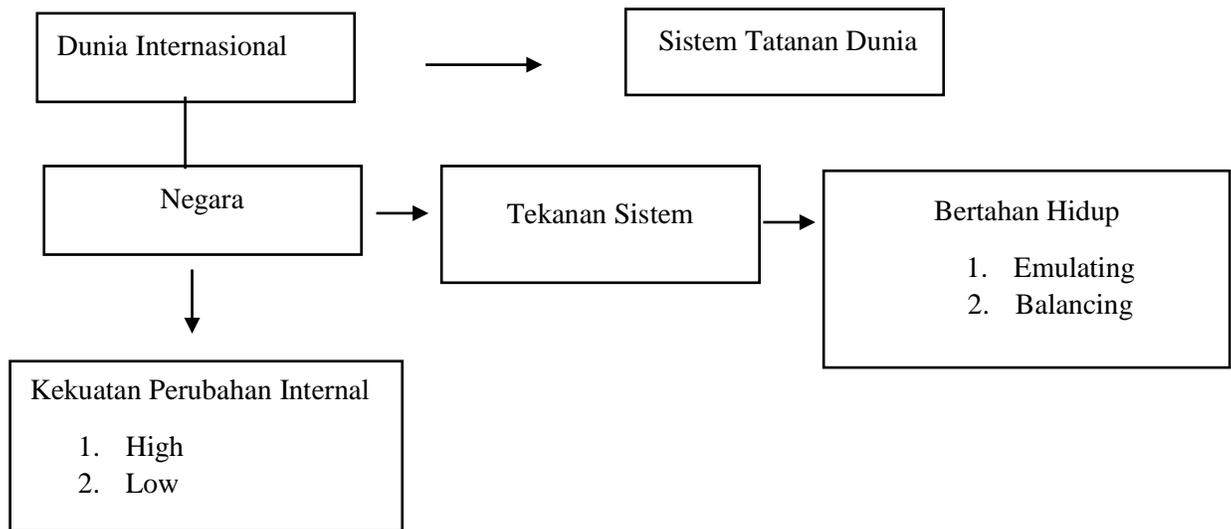
negara kuat membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara terlibat konflik kemudian melakukan perundingan untuk menurunkan intensitas konflik serta membuka kemungkinan untuk berdamai (Henderson, 1998).

Konflik juga dapat dicegah dengan menjalin hubungan diplomatik antar negara. Negara sadar akan posisinya yang tidak stabil dalam dunia internasional, akibatnya negara harus membentuk aliansi yang kuat untuk membangun jaminan keamanan bagi wilayahnya. Sumber dari kekuatan internasional dapat bersifat *tangible* dan *intangible* (Henderson, 1998, p. 102). *Tangible power* berupa kekuatan kasat mata terdiri atas *national resources* termasuk di dalamnya letak geografis, sumber daya alam, dan populasi serta *social resources* termasuk di dalamnya militer dan ekonomi. Sedangkan *intangible power* berupa kekuatan tidak terlihat dan tidak tersentuh, kekuatan ini berasal dari nilai-nilai serta sikap dari pemimpin dan rakyatnya. Bentuk kekuatan ini yaitu kepemimpinan, kebijaksanaan, determinasi pemerintah, nasionalisme, serta moralitas (Henderson, 1998). Kekuatan ini dengan mudah terdeteksi bagi para pimpinan negara untuk menentukan langkah kerja sama dengan negara lain guna mencapai kepentingan nasional dan membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat untuk meminimalisir potensi konflik internasional.

Peta kekuatan nasional merupakan landasan bagi pemimpin suatu negara-bangsa untuk menentukan pihak lain yang berpotensi menjadi aliansi yang kuat. Kekuatan nasional berperan penting bagi perdamaian dunia, karena setiap negara menginginkan keamanan nasional demi memenuhi aspek dasar kepentingan nasional yaitu usaha mempertahankan diri (*self-preservation*) demi bertahan hidup. Cara untuk menemukan kedamaian internasional adalah dengan membentuk kekuatan nasional sebesar-besarnya

(Henderson, 1998). Pembentukan kekuatan nasional yang paling efektif adalah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan negara berkekuatan militer yang tinggi.

Waltz mengakui bahwa kondisi politik global terkait ketidakseimbangan kekuatan menghasilkan bahaya sekalipun dominasi tersebut dimiliki oleh Amerika Serikat (Art & Waltz, 2015). Menurutnya, distribusi dan karakter kekuatan militer menjadi penyebab utama perang. Maka dari itu, Waltz menekankan faktor interaksi strategis dalam menjalin hubungan diplomatik lebih penting dibanding penyebaran kekuatan ke berbagai negara-bangsa yang sulit diukur. *Distribution of power* menyebabkan sulit terbentuknya tatanan dunia anarki sehingga konsep keamanan yang dirancang oleh para pemikir neorealisme sulit terbentuk.



**Gambar 2. Asumsi Dasar Neorealisme**

Asumsi dasar neorealisme adalah tatanan dunia internasional dengan lingkungan yang anarkis dan bersifat memaksa. Negara dalam unit sistem ini berbentuk *passive-adaptive state*. Negara tidak mampu memaksakan kepentingannya nasionalnya dan tunduk pada hierarki sistemik, sedangkan negara berada pada level bawah yang mengharuskan

kemampuan menyesuaikan diri dalam tatanan dunia. Tatanan yang bersifat memaksa ini membuat negara berkuat pada permasalahan dasar yaitu upaya bertahan hidup (Waltz, 1979).

Terdapat dua metodologi bagi unit sistem untuk menyesuaikan diri terhadap tatanan dunia yaitu *emulating* dan *balancing*. Metode pertama yaitu *emulating* atau meniru, optimalisasi kemampuan internal sesuai dengan metode negara kuat. Gambaran metode ini yaitu apabila negara kuat membangun senjata nuklir maka negara level lebih rendah juga mengembangkan teknologi nuklir yang sama untuk menyeimbangkan kekuatan militernya. (Waltz, 1979) menyimpulkan bahwa “perimbangan kekuatan penting bagi negara-negara berkaitan dengan kepentingan nasional yaitu bertahan hidup, apabila suatu negara tidak mampu mengikuti perkembangan maka negara tersebut akan runtuh.”

Metode kedua yaitu *balancing* atau menyeimbangkan. Negara menyusun strategi penyeimbang kekuatan negara kuat. Gambaran metode ini yaitu apabila suatu negara membangun senjata nuklir, maka negara lain mengembangkan teknologi senjata anti-nuklir. Teknologi militer tiap negara akan terus berkembang melalui metode ini untuk menuju kondisi *balance of power*. (Waltz, 1979) menyimpulkan bahwa “negara akan saling beradu pengembangan senjata untuk mengungguli negara lain hingga menciptakan stabilitas keamanan global.”

Kondisi tersebut mutlak bagi negara sebagai unit sistem neorealisme. Negara hanya dapat dibedakan berdasarkan potensi dalam negeri masing-masing. Negara dengan potensi kekuatan tinggi mampu beradaptasi dalam waktu singkat (*adaptive state*) sehingga memiliki peluang menjadi salah satu negara kuat dalam level sistemik.

Sedangkan negara dengan potensi kekuatan rendah sulit beradaptasi terhadap tekanan struktural (*mal-adaptive state*) sehingga memiliki peluang menjadi salah satu negara lemah dalam level sistemik (Waltz, 1979).

Level sistemik struktural dalam neorealisme bersinggungan dengan teori institusionalisme. Negara yang memiliki kesamaan kekuatan serta sumber daya membentuk kesatuan tersendiri. Penyatuan ini membentuk aturan tersendiri dalam proses pencapaian kepentingan nasional yang dikenal dengan istilah rezim. Rezim adalah serangkaian kesepakatan bersama antar unit dalam memutuskan langkah pencapaian tujuan (Krasner, 1982). Teori ini mempengaruhi perilaku unit sistem dalam tatanan dunia anarki sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama antar negara khususnya bidang keamanan internasional.

Distribusi kekuatan dalam dunia internasional membentuk situasi dilema keamanan dimana setiap negara terdesak untuk membangun dan mengembangkan kekuatan militer maupun membangun aliansi sehingga memaksa negara lain melakukan tindakan yang sama. Dilema keamanan menambah kemungkinan konflik namun di satu sisi menuju pada perimbangan kekuatan. Perimbangan kekuatan menjadi utama bagi pemikir neorealisme guna menjaga stabilitas keamanan. Dilema keamanan merupakan gagasan bahwa negara bersifat mandiri untuk memenuhi keamanan nasionalnya, bagaimanapun metode yang digunakan akan memicu ketidaknyamanan bagi negara lain karena anggapan negara mereka membangun militer untuk pertahanan diri sedangkan negara lain bersifat ancaman nasional (Herz, 1951).

## **B. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Arah kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepentingan nasional bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan sementara faktor eksternal mencakup perluasan wilayah, ekspansi perdagangan, hingga hegemoni global. Faktor diatas mencerminkan karakter suatu bangsa berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Efektivitas kebijakan luar negeri dapat dinilai melalui transformasi situasi pasca kebijakan dikeluarkan.

Kebijakan luar negeri adalah bentuk kapabilitas suatu negara untuk mempengaruhi negara lain dalam mencapai kepentingan nasional. Pemerintah ingin mempengaruhi aktivitas aktor lain yang berada diluar kedaulatannya. Suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain demi memenuhi kriteria kebijakan luar negerinya. Karakter suatu negara dipengaruhi oleh kondisi internal yaitu *natural resources* dan *social resources* (Calsnaes, 2002).

Analisis kebijakan luar negeri secara garis besar melibatkan pemeriksaan kebijakan-kebijakan eksternal negara secara lebih teliti dalam konteks ilmu pengetahuan yang lebih luas. Variabel multidisiplin diperlukan untuk mencapai rumusan kebijakan yang efektif. Perumusan kebijakan perlu memenuhi kriteria keuntungan bagi dalam negeri guna melaksanakan kepentingan dasar dalam kehidupan bernegara yaitu bertahan hidup dari segala ancaman.

Analisis kebijakan luar negeri dari sudut pandang neorealisme cenderung pada problematika pertahanan dan keamanan yang membenturkan kepentingan antar aktor negara dan hasilnya ditentukan oleh kekuatan relatif negara (Jackson & Sorensen, 2013,

pp. 440-441). Terdapat enam pendekatan dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara yaitu:

1. Pendekatan Tradisional
2. Pendekatan Komparatif
3. Pendekatan Struktur Birokrasi
4. Pendekatan Kognitif dan Psikologi
5. Pendekatan Multilevel dan Multidimensi
6. Pendekatan Konstruktivis Sosial

Pendekatan pertama menurut (Jackson & Sorensen, 2013) adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dalam analisis kebijakan luar negeri merupakan spesialisasi dari para sejarawan dan komentator publik. Pendekatan ini melibatkan kebijakan eksternal pemerintah berdasarkan informasi latar belakang sejarah hubungan diplomatik, pemahaman kepentingan dan perhatian pada faktor pendorong kebijakan, dan berpikir metode mempertahankan kepentingan nasional. Pendekatan ini mengedepankan pemikiran rasional terhadap cara praktis dalam bertindak mencapai kebijakan luar negeri.

Pendekatan kedua menurut (Jackson & Sorensen, 2013) adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dalam analisis kebijakan luar negeri mengedepankan penggabungan beberapa data dari berbagai negara. Pendekatan ini berambisi membangun teori sistematis dan penjelasan proses kebijakan luar negeri secara umum. Pendekatan ini mengidentifikasi berbagai kemungkinan sumber yang relevan dengan keputusan keputusan kebijakan luar negeri lalu mengelompokkan dalam

lima kategori variabel: variabel idiosinkratik, variabel peran, variabel pemerintahan, variabel sosial, dan variabel sistemik.

Pendekatan ketiga menurut (Jackson & Sorensen, 2013) adalah pendekatan struktur birokrasi dan pendekatan proses. Pendekatan struktur birokrasi dan pendekatan proses dalam kebijakan luar negeri fokus pada organisasi perumus kebijakan. Analisis proses dilakukan oleh organisasi untuk menentukan cara memperoleh pengetahuan empiris tentang kebijakan luar negeri. Pusat kekuatan pendekatan ini terletak pada empirisme organisasi pengambil keputusan dengan memperhatikan detail bagi kebijakan dengan cara yang konkret dalam cara kerja para pembuat kebijakan. Pendekatan ini berfokus pada birokrasi menganalisis rumusan kebijakan dengan metode empirisme.

Pendekatan keempat menurut (Jackson & Sorensen, 2013) adalah pendekatan proses kognitif dan psikologi. Proses kognitif dan pendekatan psikologi berfokus pada individu sebagai pembuat keputusan dengan memperhatikan aspek psikologis. Aspek psikologis meliputi pengalaman pemimpin negara, gaya politik, sosialisasi politik, dan pandangan terhadap dunia yang lebih luas mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri. Robert Jervis menilai kesalahan perspektif aktor dalam menilai tindakan aktor lain, Jervis memandang bahwa aktor memandang apa yang mereka inginkan bukan apa yang sedang terjadi tapi dipandu oleh keyakinan yang sudah ada sebelumnya.

Pendekatan kelima menurut (Jackson & Sorensen, 2013) adalah pendekatan multilevel dan multidimensi. Pendekatan multilevel dan multidimensi merupakan pendekatan yang menggabungkan dua teori atau lebih dalam analisis kebijakan luar negeri. Teori perimbangan kekuatan dan dilema keamanan dalam pendekatan neorealisme menjadi contoh pendekatan ini. Pendekatan seperti ini langsung

memfokuskan pada pembuatan kebijakan dengan data hasil analisa penggabungan teori. Pendekatan ini memudahkan analisis kebijakan luar negeri dalam melihat permasalahan secara lebih luas.

Pendekatan keenam menurut (Jackson & Sorensen, 2013) adalah pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan konstruktivisme sosial berfokus pada peran ide, wacana, dan karakteristik sebuah kebijakan. Konstruktivis memahami dunia sebagai sistem yang membangun karakter sebuah negara secara intrasubjektif, dengan ide dan wacananya dapat sampai pada pemahaman teori yang lebih efektif. Konstruktivisme meyakini ide sebagai sumber gagasan perumusan kebijakan luar negeri.

Analisis kebijakan luar negeri dalam sudut pandang neorealisme mengarah pada rancangan resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik bertujuan besar untuk mencapai perdamaian hingga tingkat kerja sama. Resolusi konflik menekankan pada transformasi konflik dengan cara-cara non-kekerasan (*zero violence*). Konsep ini bersifat optimistik, radikal, dan egaliter, yang membentuk perubahan positif pada konflik. Konflik dapat terselesaikan melalui faktor internal yang kuat seperti pembangunan manusia dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk kemandirian agar tidak mudah mendapatkan intervensi dari negara lain (Herz, 1951).

Transformasi konflik tidak mutlak menemukan *win-win solution*, tapi konsep ini berfokus pada kajian sosial dan politik yang lebih luas untuk memutus mata rantai pemicu konflik berupa penindasan dan kekerasan. Transformasi konflik berperan besar mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi penyebab hubungan negatif antar unit yang terlibat konflik. Konflik yang konstruktif menyebabkan kemunduran bagi suatu negara, begitupun sebaliknya apabila konflik dipandang lebih luas dari segi internal

maka dapat menjadi proses terjadinya perubahan progresif bagi suatu negara (Art & Waltz, 2015).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa artikel dan jurnal yang pernah melakukan penelitian serupa. Salah satunya adalah jurnal tulisan Aziz Ur Rehman dalam *The Middle East International Journal for Social Sciences (MEIJSS)*. Dalam jurnal tersebut, perjanjian *Abraham Accord* merupakan terobosan baru yang sangat progresif, hal ini dianggap mampu menjadi corong perdamaian dari konflik Palestina dengan Israel. Banyak pihak yang menekankan kepada Israel untuk menerima syarat-syarat perdamaian dari Palestina setelah perjanjian ini ditandatangani. Perjanjian ini harus disoroti oleh Amerika Serikat kedepannya secara terus-menerus, untuk memastikan efektivitas dari kebijakan ini (Rehman, 2020).

Normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel diteliti oleh Wicaksono dalam jurnal MEIS tahun 2020. Penelitian tersebut mengangkat proses terbentuknya perjanjian yang menandai dimulainya hubungan diplomatik antar dua negara tersebut. Hubungan diplomatik yang dibangun merupakan respon atas persamaan kondisi internal kedua negara tersebut yaitu ancaman dari Iran. Kepentingan Israel terhadap Uni Emirat Arab karena faktor ekonomi global dan politik internasional. Israel memandang UEA sebagai mitra yang penting dalam ekspansi perekonomiannya dan pengakuan dunia internasional. Kepentingan UEA, di sisi lain, berfokus pada keunggulan ilmiah dan akademisi Israel, serta teknologi dan industri militernya yang canggih. Selain itu, normalisasi dengan Israel dapat membuka rute perdagangan baru untuk UEA. Hal

tersebut dapat kemungkinan terciptanya stabilisasi wilayah di Timur Tengah (Wicaksono, 2020).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian dari Aziz Ur Rehman dan Raden Mas Wicaksono yang telah disebutkan diatas. Penulis memiliki *update* data melihat jurnal tersebut diterbitkan pada bulan November tahun 2020, sedangkan Desember tahun 2020 Maroko dan Sudan resmi bergabung menjadi anggota perjanjian *Abraham Accord*. Selain itu, penulis juga menganalisis lebih dalam terkait peran Amerika Serikat terhadap perjanjian tersebut. Penulis menggunakan teori Neorealisme Defensif untuk mengkaji sistem kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dalam hal ini dikategorikan sebagai negara adidaya, terhadap penyelesaian konflik internasional.

Penulis memiliki dua poin utama dalam penelitian ini, yaitu peran salah satu aktor internasional, negara Amerika Serikat yang dikaji melalui teori neorealisme defensif dimana penulis akan memetakan struktur internasional yang ada dan menganalisis perilaku aktor dalam menjalin hubungan antar negara melalui teori ini. Poin selanjutnya adalah dampak kebijakan luar negeri yang berupa perjanjian perdamaian ini terhadap isu Palestina dengan Israel melalui konsep kebijakan luar negeri. Konsep dan teori yang digunakan penulis sangat berkaitan dengan rumusan masalah penelitian dan konsep dan teori ini akan mempengaruhi hasil analisis dari penelitian ini kedepannya.